



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

“INTEGRASI SDG’s DALAM RPJMD”



Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA

2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



RENCANA PROGRAM TAHUN 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Arahan Bapak Presiden RI

1. Penggunaan APBN harus fokus, hindari rutinitas, dan memberikan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengadaan barang dan jasa/lelang dapat dilaksanakan lebih awal.
3. Pastikan penggunaan anggaran berorientasi pada *outcome* bermanfaat untuk masyarakat, diprioritaskan untuk kegiatan “utama” bukan untuk kegiatan pendukung (contoh: Belanja Honor, Belanja Perjalanan Dinas).
4. Sinergitas Pusat dan Daerah.
5. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran secara berkala dilaksanakan terus menerus (Triwulan, Semester).
6. Sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran, pastikan setiap rupiah hasilnya bermanfaat untuk Rakyat, jangan ada kegiatan penyimpangan/korupsi/pemborosan.



Acara Penyerahan DIPA TA. 2019 oleh Bapak Presiden RI secara Nasional pada tanggal 11 Desember 2019 di Istana Negara



PILKADA SERENTAK PROVINSI Tahun 2015, 2017, Dan 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Pemilukada serentak yang sudah dilaksanakan pada tiga tahapan yakni 2015, 2017 dan 2018 bertujuan untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan anggaran pemerintah yang berujung pada terwujud pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 (UU No.10 Tahun 2016).



Dengan adanya pilkada serentak, maka penyusunan dokumen RPJMD baru pun dilaksanakan serentak. Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dengan daerah



Tahun 2015 di (9) Provinsi Pada 16 Desember 2015

1. Kalimantan Utara
2. Jambi
3. Kalimantan Tengah
4. Kalimantan Selatan
5. Sumatera Barat
6. Kepulauan Riau
7. Sulawesi Utara
8. Bengkulu
9. Sulawesi Tengah

Kabupaten : 224
Kota : 36

Tahun 2017 di (7) Provinsi Pada 15 Februari 2017

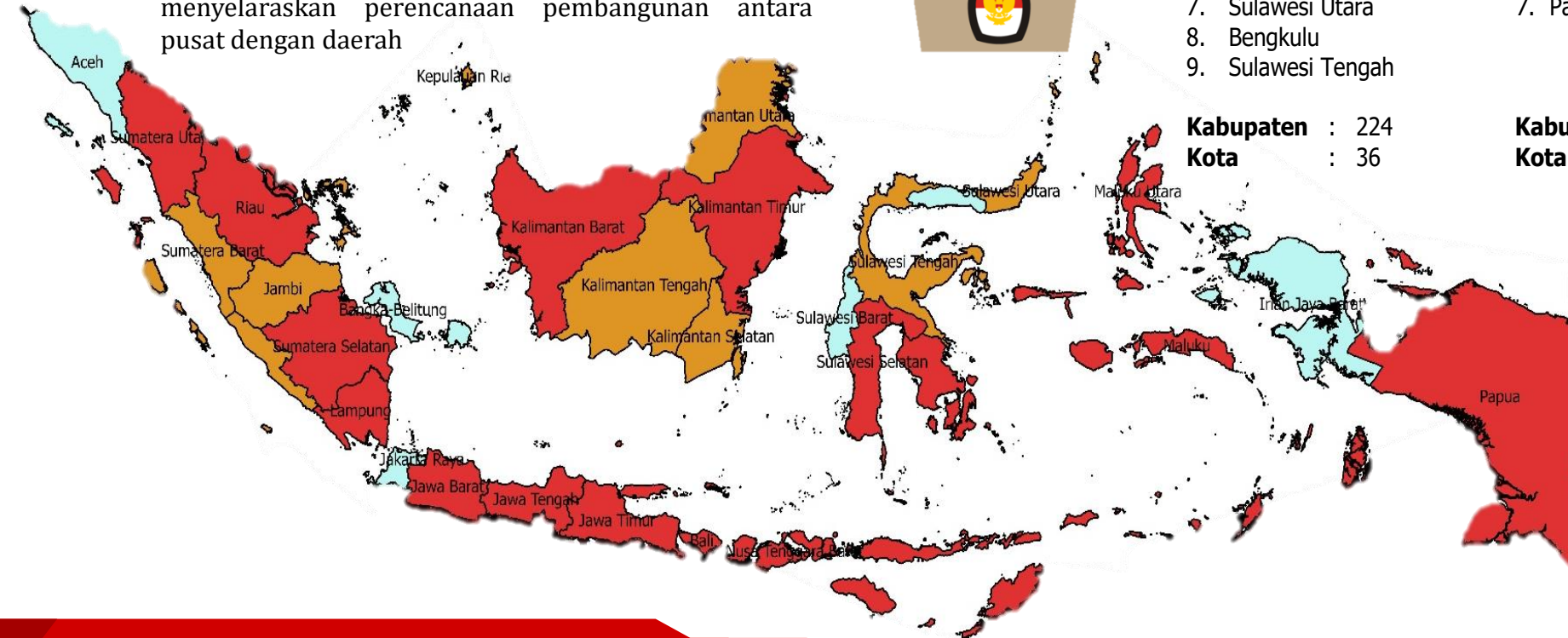
1. Aceh
2. Kepulauan Bangka Belitung
3. DKI Jakarta
4. Banten
5. Gorontalo
6. Sulawesi Barat
7. Papua Barat

Kabupaten : 76
Kota : 18

Tahun 2018 di (17) Provinsi Pada 17 Februari 2018

1. Sumatera Utara
2. Riau
3. Sumatera Selatan
4. Lampung
5. Jawa Barat
6. Jawa Tengah
7. Jawa Timur
8. Bali
9. Nusa Tenggara Barat
10. Nusa Tenggara Timur
11. Kalimantan Barat
12. Kalimantan Timur
13. Sulawesi Selatan
14. Sulawesi Tenggara
15. Maluku
16. Maluku Utara
17. Papua

Kabupaten : 115
Kota : 39





- Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah dilantik, saat ini sedang menyusun RPJMD. Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 264 Ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014:

Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

**KDH yang sudah dilantik
dari Pilkada Serentak
2018:**

05 September 2018

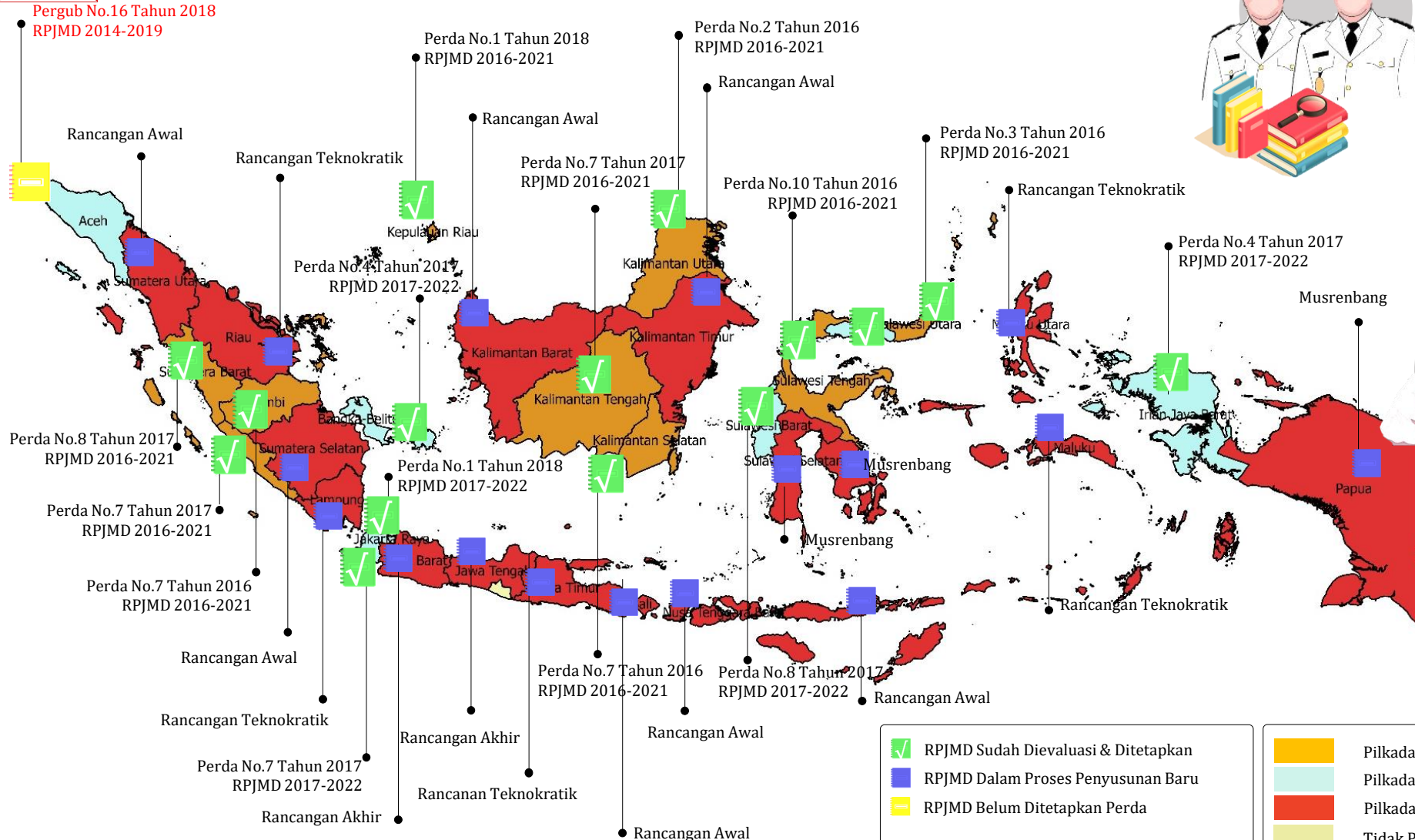
1. Jawa Tengah
2. Kalimantan Barat
3. Sumatera Utara
4. Nusa Tenggara Timur
5. Jawa Barat
6. Sulawesi Selatan
7. Bali
8. Sulawesi Tenggara
9. Papua

19 September 2018

- ## 1. Nusa Tenggara Barat

01 Oktober 2018

1. Kalimantan Timur
2. Sumatera Selatan





ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI 17 PROVINSI YANG MELAKSANAKAN PILSER 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

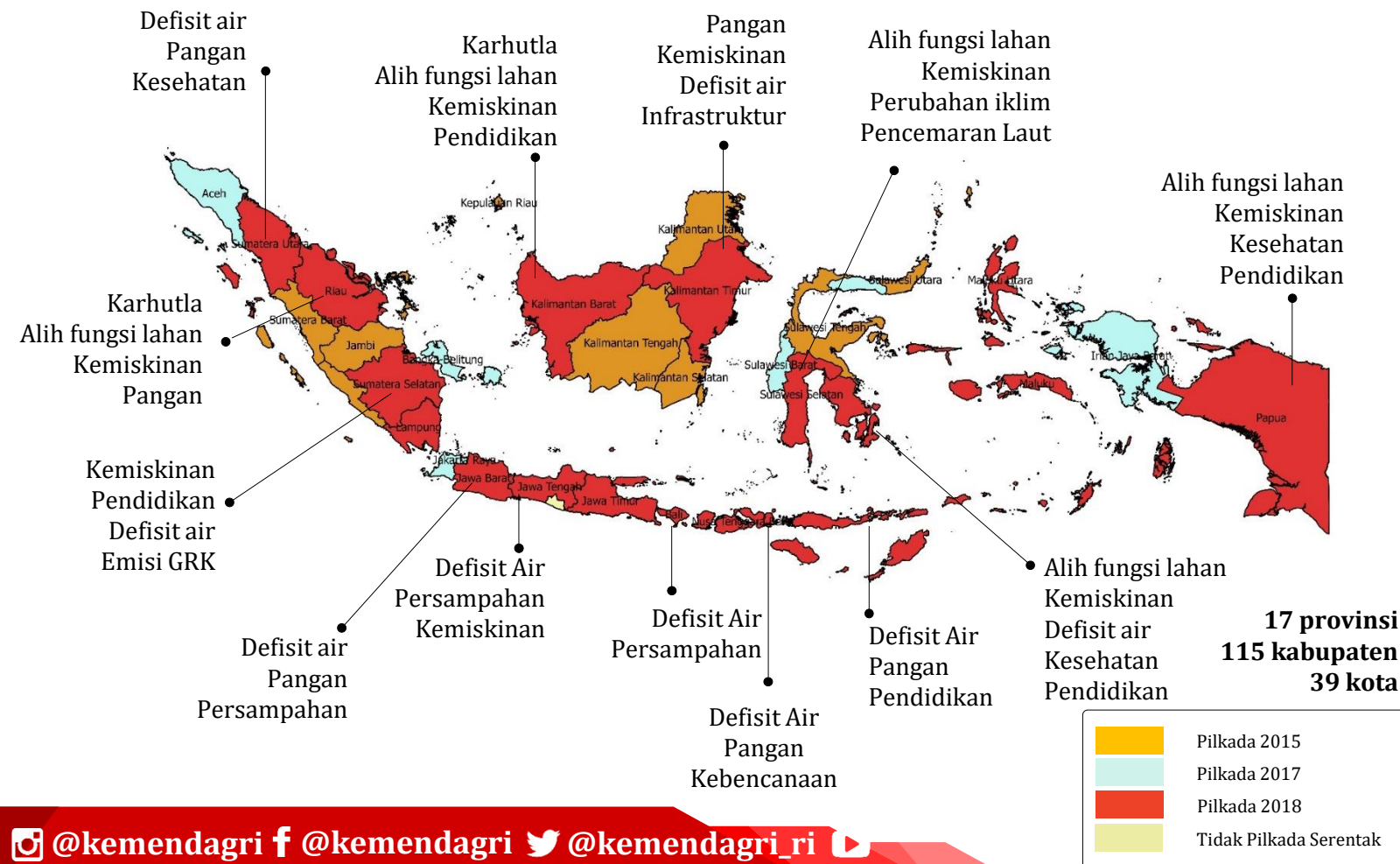


17 PROVINSI sedang menyusun KLHS RPJMD

15 PROVINSI yang sudah menyusun RAD TPB

ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN:

1. Defisit air
2. Pangan
3. Persampahan
4. Alih fungsi lahan
5. Pemenuhan SPM: kemiskinan, pendidikan, kesehatan.



Provinsi yang sudah menyusun KLHS RPJMD

1. Sumatera Selatan
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Bali
5. NTB
6. NTT
7. Sulawesi Selatan
8. Sulawesi Tenggara
9. Papua

Provinsi yang sedang menyusun KLHS RPJMD

1. Sumatera Utara
2. Riau
3. Lampung
4. Jawa Timur
5. Kalimantan Barat
6. Kalimantan Timur
7. Maluku
8. Maluku Utara

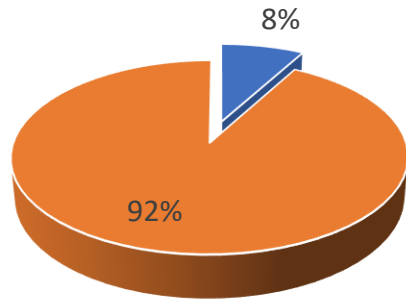
Provinsi yang sudah menyusun RAD TPB

1. Riau
2. Sumatera Barat
3. Bengkulu
4. Lampung
5. Jawa Barat
6. Jawa Tengah
7. DI Yogyakarta
8. Jawa Timur
9. Bali
10. NTB
11. NTT
12. Kalimantan Timur
13. Kalimantan Utara
14. Sulawesi Selatan
15. Gorontalo



KONTRIBUSI APBD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

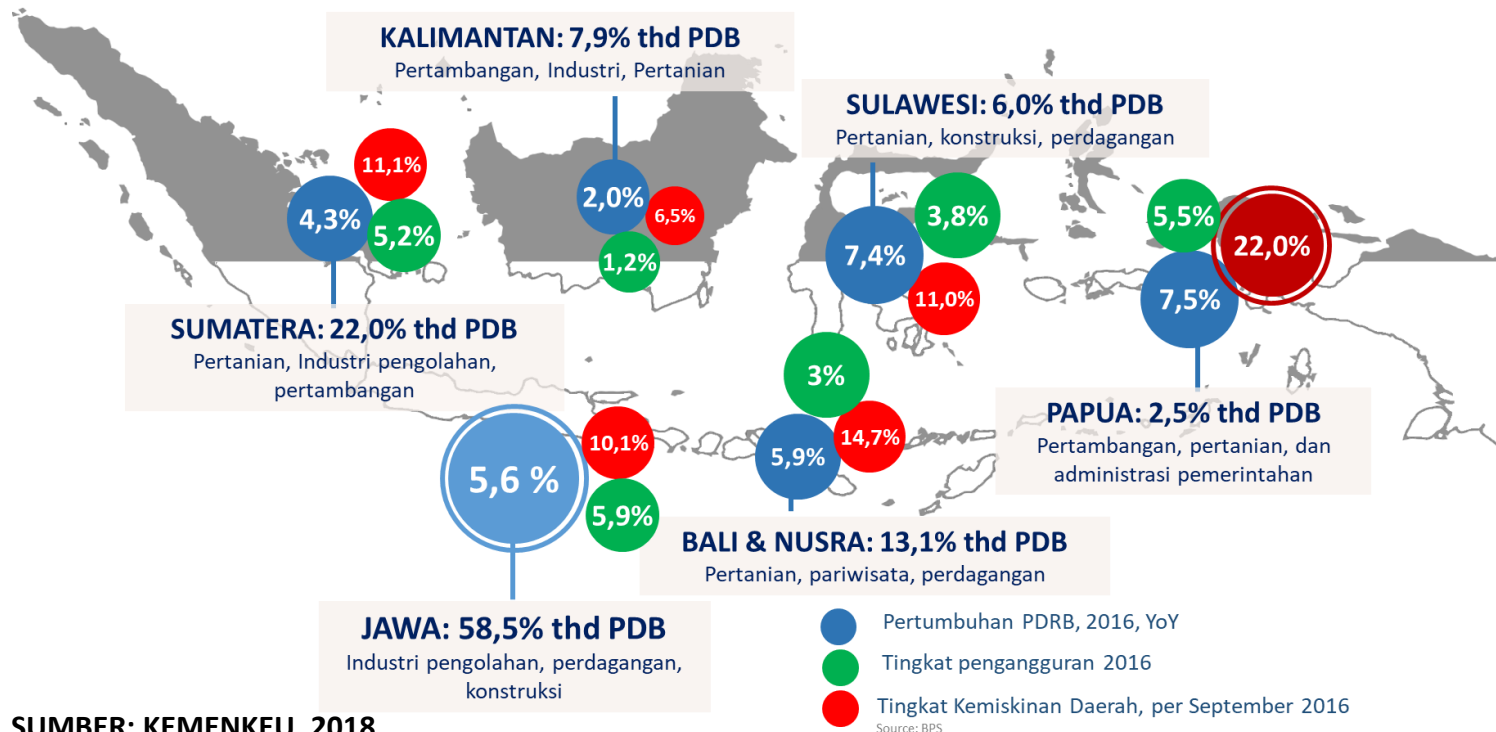


Kontribusi APBD dikisaran 8% terhadap pembangunan daerah, 92% merupakan kontribusi dari non pemerintah (masyarakat dan swasta)

DIPERLUKAN INOVASI DAERAH UNTUK:

1. Meningkatkan pelayanan publik
2. Memberdayakan peran serta masyarakat
3. Meningkatkan daya saing daerah

Berdasarkan PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah



SUMBER: KEMENKEU, 2018

TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Ketimpangan masih terjadi
- Sumber pertumbuhan bertumpu pada kawasan barat
- Tingkat kemiskinan tinggi
- Ekonomi daerah bertumpu pada sumber daya alam
- Kemandirian ekonomi daerah masih bergantung pada pusat.
- Bonus demografi meningkat tanpa dibarengi dengan kualitas SDM
- Meningkatnya belanja untuk pelayanan publik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk
- Skema pendanaan pembangunan daerah yang masih konvensional

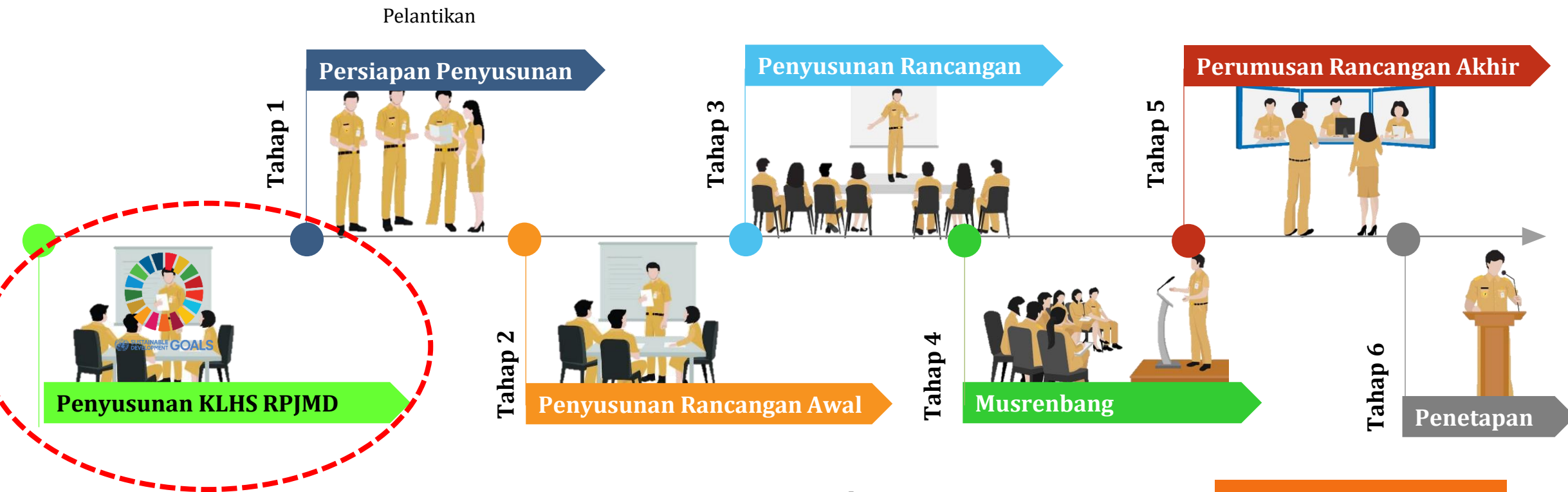


INTEGRASI TPB/SDGs Dalam Tahapan Penyusunan RPJMD

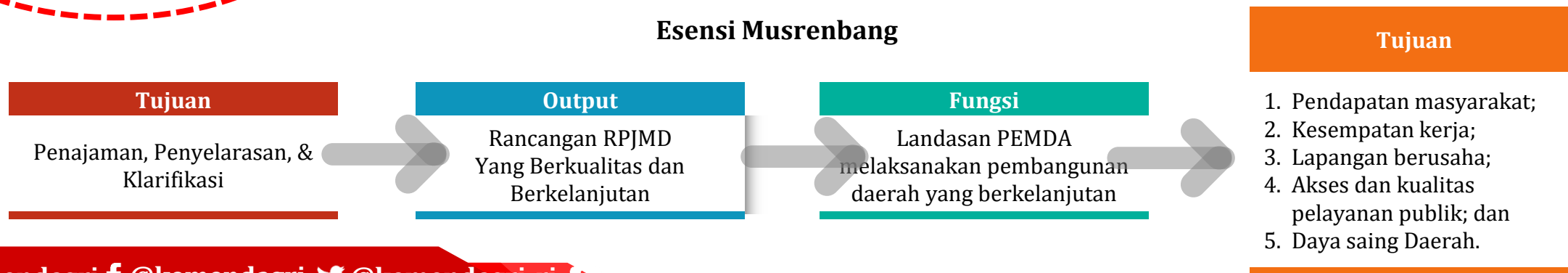
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Pengintegrasian SDGs dalam Perencanaan Daerah dilakukan sebelum penyusunan Rancangan Awal RPJMD



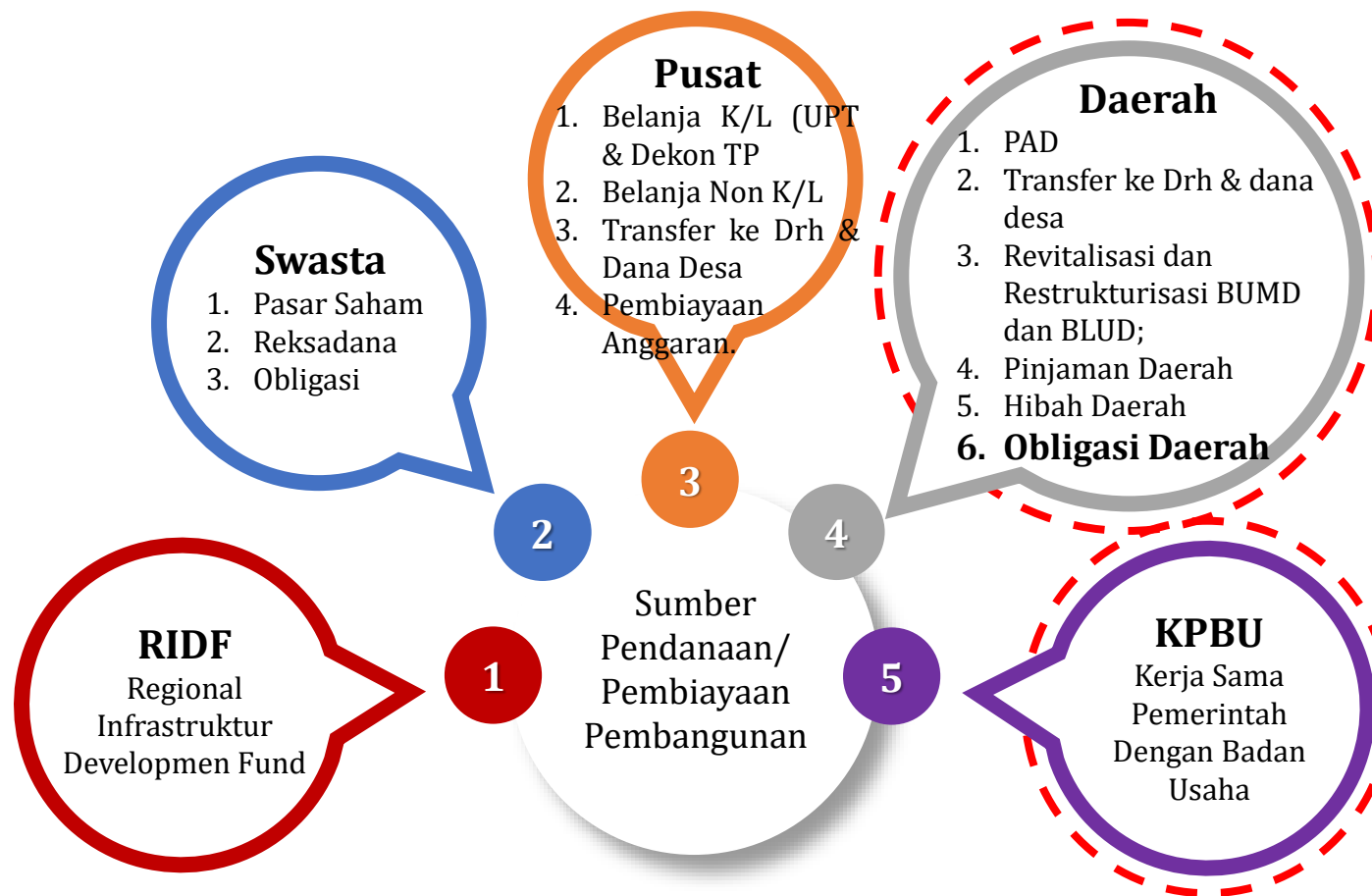
Esensi Musrenbang





SKEMA PENDANAAN Pembangunan Daerah

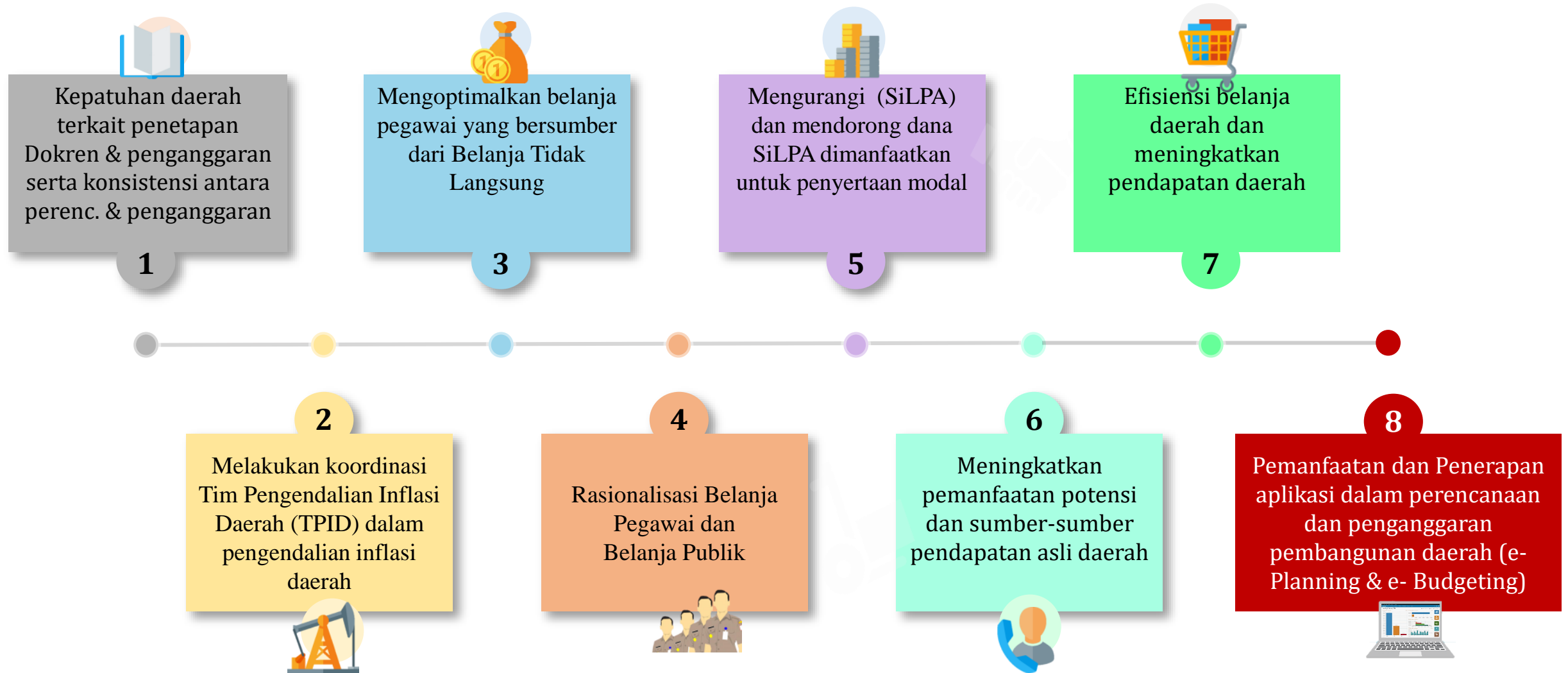
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



- Daerah diberikan kewenangan untuk untuk membiayai pembangunan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik wilayahnya melalui berbagai skema pendanaan.



Implikasi Positif yang Diperoleh Pemda Dalam Rangka Optimalisasi Skema Pendanaan untuk Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah





ARAHAN

Percepatan Pelaksanaan TPB

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



1

Daerah segera menyelesaikan pembuatan KLHS RPJMD sebagai instrument yang memastikan TPB/SDGs terintegrasi kedalam dokumen RPJMD

2

Daerah perlu melakukan terobosan/inovasi untuk menjawab tantangan pembangunan

3

Daerah diberikan kewenangan untuk untuk membiayai pembangunan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik wilayahnya melalui berbagai skema pendanaan.

4

Daerah perlu melibatkan pihak non pemerintah dalam pembangunan daerah agar pelaksanaan pemerintahan daerah memiliki implikasi positif.



TERIMA KASIH